

Memperkenalkan Green Halal Industry Index (GHII): Standar Baru Industri Halal Era ESG

Pendahuluan

Industri halal global saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap syariat Islam melalui sertifikasi halal. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap isu lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, paradigma industri halal juga mengalami transformasi. Konsumen Muslim modern tidak hanya menuntut produk yang halal, tetapi juga menginginkan produk yang diproduksi secara berkelanjutan, ramah lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta dikelola dengan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

Di tingkat global, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberlanjutan suatu perusahaan maupun industri. Investor, pemerintah, dan konsumen semakin menjadikan ESG sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah industri tidak lagi diukur semata-mata dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, industri halal memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor model bisnis berkelanjutan. Nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan (*mizan*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan terhadap kerusakan (*fasad*) sesungguhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang berkembang saat ini. Namun demikian, hingga kini belum tersedia suatu instrumen yang secara komprehensif mampu mengukur kinerja industri halal dari perspektif kepatuhan halal sekaligus keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Green Halal Industry Index (GHII) diperkenalkan sebagai sebuah kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat keberlanjutan industri halal secara lebih komprehensif.

Mengapa Industri Halal Membutuhkan Indeks Baru?

Selama ini, keberhasilan industri halal umumnya diukur melalui beberapa indikator seperti jumlah sertifikasi halal, nilai ekspor produk halal, jumlah pelaku usaha bersertifikat halal, maupun kontribusi sektor halal terhadap perekonomian nasional. Meskipun penting, indikator-indikator tersebut belum mampu menggambarkan kualitas keberlanjutan industri halal secara menyeluruh.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memiliki sertifikat halal, namun masih menggunakan energi yang tidak efisien, menghasilkan limbah berlebihan, atau belum memiliki program tanggung jawab sosial yang memadai. Dalam kondisi demikian,

perusahaan tersebut telah memenuhi aspek halal secara administratif, tetapi belum tentu mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan yang menjadi bagian dari ajaran Islam.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya mengukur status halal, tetapi juga mengevaluasi bagaimana perusahaan atau pelaku usaha menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya. Di sinilah Green Halal Industry Index (GHII) memiliki peran strategis.

Apa Itu Green Halal Industry Index (GHII)?

Green Halal Industry Index (GHII) merupakan suatu indeks yang dirancang untuk mengukur tingkat keberlanjutan industri halal berdasarkan integrasi antara kepatuhan halal dan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

GHII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sertifikasi halal yang telah ada, melainkan menjadi instrumen pelengkap yang mampu memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kualitas industri halal. Dengan kata lain, jika sertifikasi halal menjawab pertanyaan “apakah produk ini halal?”, maka GHII berupaya menjawab pertanyaan yang lebih luas, yaitu “seberapa berkelanjutan industri halal tersebut?”

Secara konseptual, GHII dapat dibangun melalui empat dimensi utama:

1. Halal Compliance

Dimensi ini mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku, termasuk:

- Kepemilikan sertifikat halal.
- Sistem Jaminan Produk Halal.
- Ketertelusuran bahan baku.
- Kepatuhan rantai pasok halal.
- Komitmen terhadap standar halal berkelanjutan.

2. Environmental Responsibility

Dimensi lingkungan menilai sejauh mana perusahaan memperhatikan aspek ekologis dalam operasionalnya, seperti:

- Efisiensi energi.
- Penggunaan energi terbarukan.
- Pengelolaan limbah.
- Pengurangan emisi karbon.
- Penggunaan bahan baku ramah lingkungan.

3. Social Responsibility

Dimensi sosial mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan melalui:

- Kesejahteraan tenaga kerja.

- Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Pengembangan UMKM.
- Keterlibatan masyarakat.
- Program pemberdayaan sosial.

4. Governance and Digitalization

Dimensi ini mengukur kualitas tata kelola dan transformasi digital perusahaan, antara lain:

- Transparansi informasi.
- Manajemen risiko.
- Kepatuhan regulasi.
- Digitalisasi proses bisnis.
- Sistem pelaporan keberlanjutan.

GHII dan Relevansinya dengan ESG

Konsep ESG selama ini berkembang dari perspektif bisnis modern dan investasi berkelanjutan. Sementara itu, Islam telah lama mengajarkan prinsip-prinsip yang selaras dengan ESG.

Aspek lingkungan dalam ESG sejalan dengan konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Aspek sosial memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan sosial (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Adapun tata kelola yang baik sejalan dengan nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi etika bisnis Islam.

Dengan demikian, GHII dapat dipandang sebagai bentuk integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik keberlanjutan modern. Melalui pendekatan ini, industri halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan agama, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Landasan Filosofis Green Halal Industry Index dalam Perspektif Islam

Konsep Green Halal Industry Index (GHII) sesungguhnya tidak lahir dari ruang kosong. Secara filosofis, indeks ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Al-Qur'an, manusia diberikan amanah untuk memakmurkan bumi sekaligus menjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama syariat tidak hanya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), tetapi juga berkembang pada konsep perlindungan lingkungan atau *hifz al-bi'ah*. Konsep ini semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, krisis energi, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam.

Industri halal pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan industri konvensional. Halal bukan sekadar status hukum suatu produk, melainkan representasi dari nilai-nilai etika, kebersihan, keamanan, keadilan, dan kebermanfaatannya. Oleh karena itu, sebuah produk yang halal seharusnya juga diproduksi melalui proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

GHII hadir untuk memperkuat dimensi tersebut. Melalui indeks ini, konsep halal tidak hanya berhenti pada kepatuhan terhadap standar bahan baku dan proses produksi, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan mengelola energi, mengurangi limbah, memperlakukan pekerja secara adil, serta menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, GHII dapat dipandang sebagai instrumen yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa industri halal masa depan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Model Pengukuran Green Halal Industry Index

Agar dapat diterapkan secara praktis, GHII perlu memiliki metode pengukuran yang terstandarisasi. Secara konseptual, indeks ini dapat dibangun berdasarkan empat dimensi utama, yaitu *Halal Compliance*, *Environmental Responsibility*, *Social Responsibility*, serta *Governance and Digitalization*.

Setiap dimensi diberikan bobot tertentu sesuai tingkat kontribusinya terhadap keberlanjutan industri halal. Sebagai ilustrasi, formula GHII dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GHII} = (0,35 \times \text{HC}) + (0,30 \times \text{ENV}) + (0,20 \times \text{SOC}) + (0,15 \times \text{GOVD})$$

Keterangan:

HC = Halal Compliance

ENV = Environmental Responsibility

SOC = Social Responsibility

GOVD = Governance and Digitalization

Bobot terbesar diberikan pada Halal Compliance karena kepatuhan halal tetap menjadi fondasi utama industri halal. Namun demikian, aspek lingkungan memperoleh bobot yang relatif tinggi mengingat tantangan global terkait perubahan iklim dan tuntutan ekonomi hijau yang semakin kuat.

Hasil pengukuran GHII dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- GHII 80–100 : Green Halal Leader
- GHII 60–79 : Green Halal Performer

- GHII 40–59 : Green Halal Emerging
- GHII < 40 : Green Halal Developing

Klasifikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, investor, maupun konsumen untuk menilai kualitas keberlanjutan suatu perusahaan atau sektor industri halal.

Implementasi GHII pada UMKM Halal Indonesia

Salah satu sektor yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari penerapan GHII adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sekaligus menjadi aktor utama dalam pengembangan ekosistem halal nasional.

Selama ini sebagian besar UMKM halal masih berfokus pada proses memperoleh sertifikasi halal. Padahal, tantangan yang dihadapi UMKM tidak hanya terkait aspek halal, tetapi juga efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan teknologi digital, hingga akses terhadap pembiayaan berkelanjutan.

Melalui GHII, UMKM dapat memperoleh alat ukur yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kinerja usahanya. Sebagai contoh, sebuah UMKM makanan halal dapat meningkatkan skor GHII melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan, pemanfaatan energi surya skala kecil, digitalisasi pencatatan usaha, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar.

Selain itu, GHII juga dapat mendorong munculnya ekosistem insentif. Pemerintah dapat memberikan penghargaan, akses pembiayaan, atau program pendampingan khusus bagi UMKM yang memiliki skor GHII tinggi. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi bisnis menuju model usaha yang lebih berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, penerapan GHII pada UMKM dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Konsumen internasional saat ini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga produk yang memenuhi standar halal sekaligus ESG akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Roadmap Pengembangan GHII Menuju Standar Nasional dan Global

Agar GHII dapat berkembang menjadi instrumen yang kredibel, diperlukan roadmap pengembangan yang terstruktur. Tahap pertama adalah penyusunan kerangka konseptual dan indikator pengukuran yang melibatkan akademisi, regulator, pelaku usaha, lembaga sertifikasi halal, serta praktisi ESG.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pilot project pada beberapa sektor prioritas seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, fesyen muslim, farmasi halal, dan pariwisata halal. Uji coba ini penting untuk memastikan bahwa indikator GHII dapat diterapkan secara praktis dan menghasilkan pengukuran yang valid.

Tahap ketiga adalah pengembangan platform digital GHII. Sistem digital memungkinkan proses pengumpulan data, perhitungan skor, benchmarking, dan pelaporan dilakukan secara lebih efisien. Digitalisasi juga membuka peluang integrasi dengan sistem sertifikasi halal yang telah ada.

Tahap keempat adalah pengakuan nasional melalui kolaborasi dengan BPJPH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta berbagai lembaga terkait lainnya. Pada tahap ini, GHII dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung kebijakan pengembangan industri halal nasional.

Tahap terakhir adalah internasionalisasi GHII. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkenalkan GHII sebagai model pengukuran keberlanjutan industri halal di tingkat global. Jika berhasil, GHII dapat menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam pengembangan standar halal dunia yang lebih adaptif terhadap isu keberlanjutan.

Melalui roadmap tersebut, GHII tidak hanya menjadi konsep akademik, tetapi dapat berkembang menjadi instrumen strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global yang berkelanjutan.

Manfaat Green Halal Industry Index

Penerapan GHII berpotensi memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak.

Bagi Pemerintah

GHII dapat menjadi instrumen evaluasi dalam pengembangan ekosistem halal nasional. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor atau wilayah yang memiliki tingkat keberlanjutan tinggi maupun yang masih memerlukan pembinaan.

Bagi BPJPH

GHII dapat menjadi pelengkap sistem jaminan produk halal yang selama ini berfokus pada aspek kepatuhan halal. Dengan adanya GHII, pengembangan industri halal dapat diarahkan menuju standar yang lebih komprehensif dan berorientasi masa depan.

Bagi Pelaku Usaha

GHII dapat menjadi alat ukur internal untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pelaku usaha dapat mengetahui posisi mereka dalam aspek halal, lingkungan, sosial, dan tata kelola sekaligus.

Bagi Investor

GHII dapat menjadi sumber informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya bagi investor yang memiliki perhatian terhadap sektor halal dan investasi berkelanjutan.

Bagi Konsumen

Konsumen memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kualitas produk dan perusahaan yang mereka pilih, tidak hanya dari sisi kehalalan tetapi juga dari sisi keberlanjutannya.

Peluang Indonesia Menjadi Pelopor Green Halal Industry

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki komitmen kuat dalam pengembangan industri halal. Berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal hingga penguatan ekosistem halal nasional.

Namun demikian, persaingan industri halal global semakin kompetitif. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki terus mengembangkan berbagai inovasi dalam sektor halal. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan terobosan baru yang mampu memberikan nilai tambah sekaligus membangun posisi strategis di tingkat internasional.

Green Halal Industry Index dapat menjadi salah satu inovasi tersebut. Jika dikembangkan secara sistematis, GHII berpotensi menjadi referensi nasional bahkan global dalam mengukur kualitas industri halal berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam pengembangan standar halal yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan syariah, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Penutup

Era ESG telah mengubah cara dunia memandang keberhasilan sebuah industri. Industri halal tidak dapat lagi hanya berfokus pada sertifikasi dan kepatuhan administratif, tetapi perlu menunjukkan kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang baik.

Dalam konteks tersebut, Green Halal Industry Index (GHII) hadir sebagai sebuah gagasan yang menawarkan pendekatan baru dalam mengukur kualitas industri halal secara lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan dimensi halal, lingkungan, sosial, dan tata kelola, GHII berpotensi menjadi standar baru bagi industri halal masa depan.

Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pasar halal terbesar, tetapi juga menjadi pelopor dalam membangun model industri halal yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Green Halal Industry Index merupakan salah satu langkah awal menuju visi besar tersebut.

Dr. Hadi Peristiwa, S.E., M.M., IPLCM

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Founder of Halal Insight Academy